

Sambut Pesta Demokrasi Daerah, Rutan Balikpapan Terima Kedatangan PPS Kelurahan Damai Bahagia Terkait Kesiapan Pilkada 2024

Muhammad Febr - BALIKPAPAN.LAPASNEWS.COM

Sep 18, 2024 - 11:32



BALIKPAPAN - Rutan Kelas IIA Balikpapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur terima kedatangan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Damai Bahagia yang melakukan kunjungan dalam rangka penyerahan formulir Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) khusus untuk

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Rutan tersebut. Rabu (18/09/2024)

Kedatangan tim PPS tersebut disambut hangat oleh Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, Bapak Abdurahman, dan Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Bapak Yogi Wedha. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Abdurahman memberikan gambaran terkini mengenai situasi dan kondisi Rutan Balikpapan yang saat ini dihuni oleh 1.148 warga binaan. Ia menekankan pentingnya peran KPPS khusus dalam memastikan partisipasi warga binaan dalam Pilkada mendatang, meski mereka sedang menjalani masa pidana. "Kami terus mempersiapkan diri, baik dari segi teknis maupun administrasi, agar seluruh proses pemilihan berjalan lancar," ujar Abdurahman.

Selain membahas kesiapan menghadapi Pilkada 2024, juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang berlangsung pada bulan Februari lalu. Dari evaluasi tersebut, beberapa hal yang menjadi catatan antara lain pentingnya pendataan warga binaan yang memenuhi syarat sebagai pemilih serta peningkatan koordinasi dengan KPPS di lapangan.

Kepala Rutan Balikpapan, Bapak Agus Salim, turut memberikan tanggapannya terkait kunjungan tersebut. "Rutan Balikpapan siap berperan aktif dalam menyukseskan Pilkada 2024. Evaluasi dari pelaksanaan Pilpres sebelumnya menjadi bahan pembelajaran bagi kami. Kami akan memastikan hak pilih warga binaan terpenuhi dengan baik serta mendukung penuh pelaksanaan pemilu di lingkungan Rutan," ujar Agus Salim.

Dengan adanya kegiatan ini, Rutan Balikpapan semakin menunjukkan komitmennya untuk ikut serta dalam proses demokrasi nasional, menjamin bahwa warga binaan tidak kehilangan hak pilihnya.